

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Partai Golongan Karya

1. Sejarah

Awal berdirinya Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 1982 yang saat itu dinamakan Komisariat Kecamatan (Komcat) yang ada di Kecamatan Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Karena pada saat itu Kabupaten Rokan Hilir masih berada dalam administratif Kabupaten Bengkalis, sehingga Komisariat Kecamatan tersebut berada di bawah naungan Dewan Pimpinan Golongan Karya Daerah Tingkat II Bengkalis.

Adapun pengurus Komisariat Kecamatan terdiri dari H. Marzuki, Mansur, Azwar, SH Anzhar Haji, Sudarno Mahyudin, Poniran, H. Ismail dan Rustam Ismail. Setelah dua tahun pemekaran Kabupaten Rokan Hilir dari Kabupaten Bengkalis, dan telah dilaksanakannya Pemilu Umum Pasca Reformasi tahun 1999 dan Golongan Karya pun sudah menjadi salah satu partai Politik peserta Pemilu pada waktu itu, maka pada tahun 2001 pelaksanaan Musyawarah Daerah dipercepat. Adapun hasil dari pelaksanaan musyawarah daerah tersebut menetapkan pengurus yang terdiri dari :

Ketua	:	H.Annas Maamun
Wakil Ketua	:	Djakfar, KH
	:	Ir.Khudri Junid
	:	Usman WK
	:	Ety Chritiati
Sekretaris	:	Azwar,SH
Wakil Sekretaris	:	Anton Guitama
	:	Chandra Rivai Bungsu,SH
	:	Drs.Sudirman
	:	H.Fachruddin,SH
Bendahara	:	Hj.Khadijah
Wakil Bendahara	:	H.Khairul Rasyid
	:	A.Hok

(Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir)

Setelah terbentuknya kepengurusan tersebut, maka roda organisasi Partai Golkar pun bergerak cepat untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004. Untuk memperluas jaringan dan mengkokohkan keberadaan partai, maka dibentuklah beberapa Pimpinan Kecamatan Partai Golkar serta ditetapkan pula beberapa program – program kerja yang telah ditetapkan langsung direalisasikan oleh pengurus dan kader – kader partai.

Dengan berjalannya roda organisasi partai, maka pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 Partai Golkar yang bernomor urut 20 tersebut berhasil memenangkan pemilu dengan meraih 31.456 suara dan mendudukan 8

orang kader sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dan tentunya hal ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Adapun Nama – nama anggota Dewan tersebut antara lain :

1. H. Annas Maamun
2. Darwis Syam
3. Azwar, SH
4. Dedi Humadi
5. H.A Darwis
6. Donald Tambunan
7. Djakfar, KH,R
8. Ir.Khudri, MM

(*Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir*)

Partai Golkar juga berhasil mendudukkan Ketua DPD Golkar yakni H. Annas Maamun sebagai Ketua DPRD Rokan Hilir periode 2004 - 2009. Namun pada tahun 2006 digantikan oleh Dedi Humadi, hal ini dikarenakan H. Annas Maamun terpilih sebagai Bupati Rokan Hilir periode 2006 – 2011. Dan juga dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPRD, karena pemilu tahun 2004 menggunakan mekanisme nomor urut secara otomatis digantikan oleh H. Rasmali, SH.

Pada Tahun 2005 Partai Golkar kembali melaksanakan Musyawarah Daerah II yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi. Hasil dari Musda tersebut menetapkan H.Annas Maamun secara aklamasi sebagai Ketua

untuk masa bhakti 2004 – 2009. Berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Riau, Nomor: Kep-31/DPD/Golkar-R/XII/2004 tertanggal 6 Desember 2004, adapun Komposisi dan Personalia Hasil Musyawarah Daerah DPD Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir, terdiri dari :

Ketua	: H. Annas Maamun
Wakil Ketua	: Darwis Syam
	: Azwar,SH
	: Dedi Kurniawan
	: Evan Simin
Sekretaris	: Nasrudin Hasan
Wakil Sekretaris	: Tatang Hartono
	: Asnur,SE
	: Yunadi
	: Azhar Naji
Bendahara	: Susilawati
Wakil Bendahara	: Yonatan
	: Mirza Noor

(Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir)

Belum genap memasuki satu tahun masa kepengurusan untuk menjalankan roda keorganisasian dan merealisasikan beberapa program – program kerja yang telah direncanakan, tepat pada tahun 2006 Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk

pertama kali nya secara langsung oleh rakyat semenjak Kabupaten ini dimekarkan. Tentunya momentum ini merupakan ajang yang dinantikan oleh setiap partai politik dalam rangka memperoleh tampuk kekuasaan ditingkat eksekutif yakni Bupati dan Wakil Bupati secara konstitusi melalui pemilihan umum.

Begitu juga dengan Partai Golkar Rokan Hilir, pilkada ini merupakan momentum untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat agar dapat dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dari sektor pertambangan Migas, pertanian dan perikanan ini. Setelah menjalankan rangkaian proses komunikasi politik serta konstitusi aturan main partai, Partai Golkar pun ikut mewarnai pelaksanaan pemilukada ini dengan mengusung Sang Ketua DPD yakni H. Annas Maamun sebagai Calon Bupati dengan H. Suyatno sebagai Calon Wakil Bupati yang berasal dari kalangan birokrat.

Berkat kepiawaian dan kematangan berpolitiknya, H. Annas Maamun sang Ketua DPD Golkar yang juga mantan Ketua DPRD Rokan Hilir ini mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sehingga pasangan yang diusung Partai Golkar ini dapat memenangkan pemilukada dengan meraih 68.911 suara (34.64%). Ini merupakan buah dari kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Golkar selama ini, sehingga mampu mendudukkan kadernya sebagai Bupati untuk Periode 2006 – 2011. (*Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir*)

Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD dan DPRD yang digelar pada 9 April 2009, ada perubahan mekanisme dalam penetapan calon terpilih. Pada

pemilu tahun 2009 ini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Calon Anggota DPR/DPRD terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam memperebutkan pertarungan kursi Legislatif DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Partai Golkar sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu yang mendapatkan nomor urut 23 berhasil keluar sebagai pemenang dengan meraup 57.865 suara atau (25,76 %), sehingga mampu menempatkan kader – kader terbaiknya dengan meraih 12 kursi.

Adapun nama – nama anggota Dewan antara lain :

1. Mirza Noor
2. H. Syafri Yunan
3. Rosmali, SH
4. Darwis Syam
5. Surya Darma
6. Nasruddin Hasan
7. Dedi Humadi
8. MHD.Rajin Ginting.S
9. Abdullah
10. Hj. Rosmida Sirait
11. Emilda
12. Karmila Sari, S.Kom,MM

(Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir)

Tidak sampai disitu saja, kemenangan Partai Golkar juga diiringi dengan berhasilnya mendudukkan Kader Golkar sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten

Rokan Hilir Periode 2009 – 2014 yang dijabat oleh Nasrudin Hasan sebagai Ketua DPRD. Hal ini berdasarkan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Provinsi / Kabupaten bahwa Pimpinan DPR / DPRD yang menetapkan bahwa Pimpinan DPR / DPRD dipimpin oleh Partai Pemenang Pemilu.

Pada tahun 2010 pelaksanaan Musyawarah Daerah III Partai Golkar Rokan Hilir Kembali dilaksanakan yang bertempat di Gedung Serba Guna Bagansiapiapi dengan Ketua Panitia H.Tatang Hartono,SE. Dalam pelaksanaan Musda tersebut hadir 13 Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar yakni PK Kubu,PK Pasir Limau Kapas, PK Bagansinembah, PK Tanah Putih, PK Sinaboi, PK Bangko, PK Batu Hampar, PK Simpang Kanan, PK Pujud, PK Rantau Kopar, PK Tanah Putih Tanjung Melawan, PK Rimba Melintang dan PK Bangko Pusako. Hasil pelaksanaan Musda tersebut secara aklamasi 13 PK Golkar kembali mempercayakan H.ANNAS MAAMUN sebagai Ketua DPD II Golkar Rokan Hilir untuk masa bhakti 2010- 2015. H.Annas Maamun yang saat itu yang juga sebagai Bupati Rokan Hilir dipandang cakap dan sukses memimpin Partai Golkar oleh kader - kader Golkar, serta dapat memperkokoh persatuan dan semangat pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, sehingga lima tahun kedepan Golkar tetap berkomitmen untuk terus kembali meningkatkan roda pembangunan demi mensejahterakan rakyat secara global. (*Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir*).

Kepengurusan	DPD	Golkar	Kabupaten	Rokan	Hilir
Periode 2010 – 2015 :					
Ketua	:	H.Annas Maamun			
Ketua Harian	:	H.Tatang Hartono, SE			
Wakil Ketua	:	Mirza Noor			
	:	Hj.Rosmida Sirait			
	:	H. Fuad Ahmad			
	:	H. Rasmali, SH			
	:	Drs.H. Nasri Somad			
	:	Rina Dewi Rani			
	:	Darwis Syam			
	:	Dedi Humadi			
	:	H. Azwar, SH			
	:	Hamzah, S.Hi			
Sekretaris	:	Nasrudin Hasan			
Wakil Sekretaris	:	H. Syahminan Baki, SH			
	:	Tuminam			
	:	Asmara MD			
	:	H. Mulyadi M Zen, SH			
	:	Jefri Bukhori, S.Pd			
	:	Hj. Ani Idris			
	:	Hj. Nurjanah			

	: Hariandi Bustam, SH
	: Hj. Tarmizah SM HK
	: Sri Jumiah
Bendahara	: Hj. Rahna
Wakil Bendahara	: Hj. Susilawati
	: Murniati, S.Pd
	: Febi Rianda, A.Md
	: Nurhafni
	: Sri Wahyuni Sapri
	: Anton Guitama
	: H. Badarudin
	: Jumati
	: Ir. Khudri Janet

(Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir)

Dalam rangka pengembangan pengembangan jaringan serta pengkaderan berlanjut sampai pada tingkat Kecamatan, dalam hal ini dibentuknya Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar: Adapun PK Golkar yang sudah terbentuk sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Kecamatan Bangko | : Jumadi |
| 2. Kecamatan Rimba Melintang | : Ilyas Yasin |
| 3. Kecamatan Bangko Pusako | : Azuar Mansur |
| 4. Kecamatan Sinaboi | : Arifin |
| 5. Kecamatan Pasir Limau Kapas | : Anmar Halom |

- | | |
|---|---------------------|
| 6. Kecamatan Kubu | : M.Nasir |
| 7. Kecamatan Simpang Kanan | : Adi Sutardi |
| 8. Kecamatan Bagan Sinembah | : Mhd.Rajin Ginting |
| 9. Kecamatan Pujud | : Emilda |
| 10. Kecamatan Tanah Putih | : Afrizal Kasim |
| 11. Kecamatan Batu Hampar | : Amiruddin |
| 12. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan | : Heridayanto |
| 13. Kecamatan Rantau Kopar | : Syafril Syam |
| 14. Kecamatan Kubu Babussalam | : M.Nasir |
| 15. Kecamatan Pekaitan | : Wakidi |

(Sumber : DPD Golkar Rokan Hilir)

Keberadaan kantor DPD Golkar yang selama ini berada di Jl. Kelenteng, pada tahun 2013 berpindah ke kantor megah berlantai 2 yang beralamatkan di Jl. Kecamatan Bagansiapiapi, kantor ini merupakan permanen hak milik partai atas perjuangan Pengurus Golkar Rokan Hilir, dan peresmianya secara langsung diresmikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Ir.H. Aburizal Bakrie (ARB).

B. Anggaran Rumah Tangga

Bab I

Keanggotaan Pasal 1

Syarat Keanggotaan

1. Yang dapat menjadi Anggota Partai Golongan Karya adalah:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin;
 3. Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan partai lainnya; dan,
 4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota;
2. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat Keanggotaan, antara lain yang berasal dari Purnawirawan TNI dan POLRI serta Pensiunan PNS, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bab II

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 2

Setiap Anggota berkewajiban :

1. Menghayati dan mengamalkan Doktrin, Ikrar, dan Paradigma Partai Golongan Karya;

2. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
3. Mematuhi dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional dan ketentuan Partai lainnya;
4. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partai;
5. Membela kepentingan partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai;
6. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat, dan kegiatan Partai;
7. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai;
8. Membayar Iuran Anggota.

Pasal 3

Setiap Anggota berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama;
2. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
3. Memilih dan dipilih;
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader;
6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

Bab III

Pemberhentian Anggota

Pasal 4

1. Anggota berhenti karena :
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
3. Diberhentikan;
4. Meninggal dunia;
5. Anggota diberhentikan karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota;
 - b. Menjadi Anggota partai politik lain;
 - c. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan atau Keputusan Musyawarah Nasional, dan atau Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Partai;
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bab IV

Kader

Pasal 5

1. Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria :
 - a. Mental - Ideologi;
 - b. Penghayatan terhadap Visi, Misi, dan Platform Partai;

- c. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT);
 - d. Kepemimpinan;
 - e. Militansi dan mandiri;
- 2. Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa;
 - 3. Ketentuan lebih lanjut tentang Kader diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bab V

Struktur dan Kepengurusan

Pasal 8

- 1. Susunan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - 2. Ketua;
 - 3. Ketua Harian, apabila diperlukan;
 - 4. Wakil-wakil Ketua;
 - 5. Sekretaris;
 - 6. Wakil-wakil Sekretaris;
 - 7. Bendahara;
 - 8. Wakil-wakil Bendahara;
 - 9. Ketua-ketua Bagian;
- 10. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 11. Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Pengurus Harian, terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Ketua Harian;
- c. Wakil-wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Wakil-wakil Sekretaris;
- f. Bendahara;
- g. Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 12

1. Syarat-syarat menjadi Pengurus Partai :
 - a. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader Partai;
 - c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela;
 - d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - e. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
 - f. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai;
2. Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal;

Bab VI

Kedudukan dan Tugas Badan / Lembaga

Pasal 20

Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di setiap tingkatan organisasi sesuai dengan kebutuhan yang berkedudukan sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Partai;

1. Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya;
2. Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkat di bawahnya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bab VII

Kedudukan dan Tugas Organisasi Sayap

Pasal 21

1. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
2. Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPK) dan

dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai;

3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
4. Organisasi Sayap tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat dibawahnya;
5. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
6. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Sayap diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bab XI
Musyawarah dan Rapat – Rapat
Bagian Ketiga
Musyawarah dan Rapat – Rapat Daerah Kabupaten / Kota
Pasal 34

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh :

1. Peserta;
2. Peninjau;
3. Undangan;
4. Peserta, terdiri atas :
 5. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 6. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Unsur Pimpinan Kecamatan;
 8. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota;
 9. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota;
 1. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/ Kota;
10. Peninjau, terdiri atas :
 1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;
11. Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh peserta;
13. Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota terpilih, Pimpinan Sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (6) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten/Kota.

Pasal 36

1. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh :
 1. Peserta;
 2. Peninjau;
 3. Undangan;
2. Peserta, terdiri atas :
 1. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;
 2. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Unsur Pimpinan Kecamatan;
 4. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota;
 5. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota;
 6. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/Kota;

3. Peninjau, terdiri atas :

1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;

4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Pimpinan Daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

1. Rapat Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dihadiri oleh :

2. Peserta;

3. Peninjau;

4. Undangan;

5. Peserta, terdiri atas :

6. Unsur Dewan Pimpinan Provinsi;

7. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Unsur Pimpinan Kecamatan;

9. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap Kabupaten/Kota;

10. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Pendiri di Kabupaten/Kota;

1. Unsur Pimpinan Daerah Ormas Yang Didirikan di Kabupaten/
Kota;

11. Peninjau, terdiri atas :

1. Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;

4) Jumlah Peserta, Peninjau, dan Undangan Rapat Kerja Daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.